

Surat Kabar : Koran Tempo
Subyek : Rehabilitasi Hutan

Edisi : 1-Agus-2011
Halaman : A8

Rehabilitasi Hutan Papua Telan Dana Rp 15 Miliar

Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Papua akan merehabilitasi 5.000 hektare kawasan konservasi yang rusak di Papua. Atas lahan seluas 2.000 hektare di antaranya akan dilakukan kerja sama dengan Kodam XVII Cenderawasih, sesuai dengan MOU antara Menteri Kehutanan dan Panglima TNI. "Dua ribu hektare itu ini letak lahannya sulit dijangkau, susah transportasi, dan situasi keamanan di lahan-lahan tersebut kurang kondusif," kata Kepala BKSDA Papua IGNN Sutedja di Jayapura kemarin.

Dari jumlah lahan yang ada, kondisi sekitar 3.500 hektare di Taman Nasional Lorentz dan 100 hektare di Taman Nasional Wasur di Merauke kritis. Lahan suaka margasatwa Mamberamo Foja seluas 1.400 hektare dan hutan wisata di Nabire juga akan direhabilitasi. Begitu juga lahan di Teluk Youtefa, Kota Jayapura, yang kondisi hutan bakaunya rusak.

Sutedja menjelaskan, jenis tanaman yang akan ditanam di lahan kritis adalah tanaman lokal di masing-masing daerah. "Seperti kayu merbau dan matoa yang kini langka," ujarnya. Untuk rehabilitasi tersebut, pemerintah pusat menggelontorkan dana sekitar Rp 15 miliar. Menurut Sutedja, rehabilitasi hutan tahun ini lebih banyak dilakukan di Taman Nasional Lorentz, yang di dalamnya terdapat sembilan kabupaten, termasuk kabupaten pemekaran dan yang terletak di kawasan Pegunungan Tengah Papua.

Begitu juga di Taman Nasional Wasur di Papua bagian selatan. Kerusakan hutan di kawasan itu akibat kebakaran hutan. Wilayah Kabupaten/Kota Jayapura yang dikelilingi Pegunungan Cyclop juga mengalami kerusakan parah. Dari 26.600 hektare, kata Sutedja, ada 1700 hektare yang rusak. Hutan seluas 1.000 hektare di Pegunungan Cyclop merupakan satu-satunya tempat resapan air untuk masyarakat kabupaten.

Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Mamberamo, Karjono, menjelaskan, luas hutan Papua sekitar 31,5 juta hektare Berdasarkan identifikasi BKSDA, lahan kritis di Papua 4,9 juta hektare atau sekitar 14,49 persen."Yang masuk kategori sangat kritis di Papua hanya 1 juta hektare atau sekitar 1,9 persen saja," katanya,



